

DAFTAR ISI

PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Masalah Tata Kelola Kebijakan Tenurial dan Gerakan Sosial.....	1
1.1.2 Konteks Masalah Tenurial Pulau Pari	3
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6 Sistematika Tesis	15
BAB II KERANGKA TEORI	17
2.1 Kebijakan Publik	17
2.1.1 Perkembangan Studi Kebijakan Publik	19
2.2 Advokasi Kebijakan	23
2.2.1 Proses Advokasi	26
2.2.2 Ragam Inisiatif dalam Advokasi Kebijakan.....	29
2.3 Gerakan Sosial.....	32
2.3.1 Ragam Bentuk Gerakan Sosial	33
2.3.2 Gerakan Sosial dan Kepemimpinan	37
2.3.3 Tantangan Advokasi Kebijakan oleh Gerakan Sosial	40
2.3.4 Capaian Gerakan Sosial terhadap sebuah Advokasi Kebijakan	48
2.4 Kerangka Berpikir	51
2.5 Definisi Konsep dan Operasional.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	54

3.1 Jenis Penelitian dan fokus permasalahan yang diteliti	56
3.2 Sumber dan Metode Pengumpulan Data Penelitian	57
3.2.1 Wawancara Mendalam	57
3.2.2 Analisis Dokumen	58
3.2.3 Observasi Langsung	58
3.2.4 Rekaman Arsip Audio Visual	58
3.3 Analisis Data	60
3.4 Validitas dan Realibilitas Data	61
3.5 Batasan Metodologis	63
BAB IV KONTEKS HISTORIS DAN GENEALOGIS GERAKAN SAVE PULAU PARI	
4.1 Pengantar	64
4.2 Masyarakat Pulau Pari dan Ruang Hidupnya	65
4.2.1 Sejarah Tenurial atas Pulau Pari & Gambaran Umum Masyarakat	65
4.2.2 Bentuk Sistem Tenural di Pulau Pari	73
4.2.3 Tonggak-tonggak Perubahan nafkah (Livelihood) Masyarakat dalam Pengelolaan Pulau Pari	77
4.2.4 Pembiaran Kebijakan dan Industrialisasi yang Gagal di Gugusan Pulau Pari	84
4.3 Konflik Tenurial antara Warga Pulau Pari dengan Bumi Raya Utama Group	93
4.3.1 Profil Perusahaan Bumi Raya Utama Group	93
4.3.2 Sejarah Ekspansi Perusahaan dan Konflik yang Terjadi dengan Masyarakat Pulau Pari	98
4.3.3 Kebijakan Legal non Legitimate & Dampak Bumi Raya Group	106
4.4 Gerakan Sosial Baru Save Pulau Pari sebagai Perjuangan Politik Rakyat	117
4.4.1 Munculya Gerakan Save Pulau Pari dan Transformasinya	117
4.4.2 Isu-isu yang mendasari Perjuangan sebagai Gerakan Sosial Baru	136
Bab V Strategi Gerakan Sosial Save Pulau Pari dalam Advokasi Kebijakan	145
5.1 Direct Presure atau Tekanan Langsung	148
5.2 Indirect Presure in Public Opinion	153
5.3 Policy Lobbying	158

5.4	Advokasi Legal.....	161
5.4.1	Advokasi Kriminalisasi di Pengadilan.....	161
5.4.2	Eksaminasi (pengujian) atas sertifikat perusahaan ke publik.....	163
5.5	Inovasi Kebijakan Reforma Agraria Pesisir & Pulau-pulau Kecil.....	170
5.5.1	Pendasaran Konstitusional untuk dilakukannya Reforma Agraria Pesisir & Pulau-pulau Kecil di Pulau Pari.....	171
5.5.2	Modeling Subyek Reforma Agraria Pulau Pari.....	177
5.5.3	Modeling Obyek Reforma Agraria di Pulau Pari	177
5.6	Refleksi Strategi Advokasi Kebijakan yang dilakukan Gerakan Sosial “Save Pulau Pari”	181
5.7	Kritik Advokasi Kebijakan yang Muncul.....	187
5.6.1	Integrasi Proses Teknokrasi, Politik, dan Partisipatif dalam Gerakan Sosial “Save Pulau Pari” untuk Inovasi Kebijakan	187
5.6.2	Dinamika dan Jebakan Oligarki Pemaparan atas Gerakan Sosial	191
Bab VI Capaian Advokasi Kebijakan oleh Gerakan Sosial: Bukan sekedar Menang atau Kalah!		195
6.1	Capaian Politik	195
6.1.1	Keluarnya Hasil LHAP Ombudsman RI sebagai Dekonstruksi Legal kepemilikan Perusahaan	195
6.1.2	Berhentinya Kriminalisasi Warga Pulau Pari.....	198
6.1.3	Dorongan Reforma Agraria di Pulau Pari menjadi Diskursus Baru Inovasi Kebijakan di Publik dan Perhatian Aktor-aktor Kebijakan.....	202
6.2	Capaian Budaya.....	206
6.2.1	Tumbuhnya Gerakan Perjuangan Perempuan	206
6.2.2	Menguatnya Demokrasi Lokal	210
6.2.3	Tumbuhnya Koperasi Sebagai semangat Ekonomi Kolektif Rakyat dan Perjuangan Selanjutnya	213
Bab VII Penutup		220
7.1	Kesimpulan.....	220
7.2	Pelajaran Berharga.....	222
DAFTAR PUSTAKA.....		226

DAFTAR ISI

PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Masalah Tata Kelola Kebijakan Tenurial dan Gerakan Sosial.....	1
1.1.2 Konteks Masalah Tenurial Pulau Pari	3
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6 Sistematika Tesis	15
BAB II KERANGKA TEORI	17
2.1 Kebijakan Publik	17
2.1.1 Perkembangan Studi Kebijakan Publik	19
2.2 Advokasi Kebijakan	23
2.2.1 Proses Advokasi	26
2.2.2 Ragam Inisiatif dalam Advokasi Kebijakan.....	29
2.3 Gerakan Sosial.....	32
2.3.1 Ragam Bentuk Gerakan Sosial	33
2.3.2 Gerakan Sosial dan Kepemimpinan	37
2.3.3 Tantangan Advokasi Kebijakan oleh Gerakan Sosial	40
2.3.4 Capaian Gerakan Sosial terhadap sebuah Advokasi Kebijakan	48
2.4 Kerangka Berpikir	51
2.5 Definisi Konsep dan Operasional.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	54

3.1 Jenis Penelitian dan fokus permasalahan yang diteliti	56
3.2 Sumber dan Metode Pengumpulan Data Penelitian	57
3.2.1 Wawancara Mendalam	57
3.2.2 Analisis Dokumen	58
3.2.3 Observasi Langsung	58
3.2.4 Rekaman Arsip Audio Visual	58
3.3 Analisis Data	60
3.4 Validitas dan Realibilitas Data	61
3.5 Batasan Metodologis	63
BAB IV KONTEKS HISTORIS DAN GENEALOGIS GERAKAN SAVE PULAU PARI	
4.1 Pengantar	64
4.2 Masyarakat Pulau Pari dan Ruang Hidupnya	65
4.2.1 Sejarah Tenurial atas Pulau Pari & Gambaran Umum Masyarakat	65
4.2.2 Bentuk Sistem Tenural di Pulau Pari	73
4.2.3 Tonggak-tonggak Perubahan nafkah (Livelihood) Masyarakat dalam Pengelolaan Pulau Pari	77
4.2.4 Pembiaran Kebijakan dan Industrialisasi yang Gagal di Gugusan Pulau Pari	84
4.3 Konflik Tenurial antara Warga Pulau Pari dengan Bumi Raya Utama Group	93
4.3.1 Profil Perusahaan Bumi Raya Utama Group	93
4.3.2 Sejarah Ekspansi Perusahaan dan Konflik yang Terjadi dengan Masyarakat Pulau Pari	98
4.3.3 Kebijakan Legal non Legitimate & Dampak Bumi Raya Group	106
4.4 Gerakan Sosial Baru Save Pulau Pari sebagai Perjuangan Politik Rakyat	117
4.4.1 Munculya Gerakan Save Pulau Pari dan Transformasinya	117
4.4.2 Isu-isu yang mendasari Perjuangan sebagai Gerakan Sosial Baru	136
Bab V Strategi Gerakan Sosial Save Pulau Pari dalam Advokasi Kebijakan	145
5.1 Direct Presure atau Tekanan Langsung	148
5.2 Indirect Presure in Public Opinion	153
5.3 Policy Lobbying	158

5.4	Advokasi Legal.....	161
5.4.1	Advokasi Kriminalisasi di Pengadilan.....	161
5.4.2	Eksaminasi (pengujian) atas sertifikat perusahaan ke publik.....	163
5.5	Inovasi Kebijakan Reforma Agraria Pesisir & Pulau-pulau Kecil.....	170
5.5.1	Pendasaran Konstitusional untuk dilakukannya Reforma Agraria Pesisir & Pulau-pulau Kecil di Pulau Pari.....	171
5.5.2	Modeling Subyek Reforma Agraria Pulau Pari.....	177
5.5.3	Modeling Obyek Reforma Agraria di Pulau Pari	177
5.6	Refleksi Strategi Advokasi Kebijakan yang dilakukan Gerakan Sosial “Save Pulau Pari”	181
5.7	Kritik Advokasi Kebijakan yang Muncul.....	187
5.6.1	Integrasi Proses Teknokrasi, Politik, dan Partisipatif dalam Gerakan Sosial “Save Pulau Pari” untuk Inovasi Kebijakan	187
5.6.2	Dinamika dan Jebakan Oligarki Pemaparan atas Gerakan Sosial	191
Bab VI Capaian Advokasi Kebijakan oleh Gerakan Sosial: Bukan sekedar Menang atau Kalah!		195
6.1	Capaian Politik	195
6.1.1	Keluarnya Hasil LHAP Ombudsman RI sebagai Dekonstruksi Legal kepemilikan Perusahaan	195
6.1.2	Berhentinya Kriminalisasi Warga Pulau Pari.....	198
6.1.3	Dorongan Reforma Agraria di Pulau Pari menjadi Diskursus Baru Inovasi Kebijakan di Publik dan Perhatian Aktor-aktor Kebijakan.....	202
6.2	Capaian Budaya.....	206
6.2.1	Tumbuhnya Gerakan Perjuangan Perempuan	206
6.2.2	Menguatnya Demokrasi Lokal	210
6.2.3	Tumbuhnya Koperasi Sebagai semangat Ekonomi Kolektif Rakyat dan Perjuangan Selanjutnya	213
Bab VII Penutup		220
7.1	Kesimpulan.....	220
7.2	Pelajaran Berharga.....	222
DAFTAR PUSTAKA.....		226